



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,**  
**PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**

TAHUN ANGGARAN 2020

**Urusan Pemerintahan** : 4 . 04      Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan  
**Organisasi** : 4 . 04 . 01      Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
**Sub Unit Organisasi** : 4 . 04 . 01 . 02      Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( PPKD )

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>	2.535.141.203.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	42.122.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.355.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	26.767.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	1.745.286.534.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	27.870.017.000,00	Perpres 129 Th 2018
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2	Dana Alokasi Umum	1.233.810.455.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3	Dana Alokasi Khusus	483.606.062.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	747.731.919.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	151.446.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	200.326.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	35.000.000.000,00	Perpres 137 Tahun 2015
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	20.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 8	Pendapatan Lain-Lain	340.958.369.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	584.316.120.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	584.316.120.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4	Belanja Hibah	48.120.800.000,00	Permendagri 14 Tahun 2016
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5	Belanja Bantuan Sosial	14.350.000.000,00	Permendagri 32 Tahun 2011
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	22.000.000.000,00	UU 23 Tahun 2014 UU 23 Tahun 2014
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	493.845.320.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000,00	Permendagri 13 Tahun 2006
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	1.950.825.083.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	43.781.644.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	43.781.644.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	16.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	16.000.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	27.781.644.000,00	

Slawi, 14 October 2019

**BUPATI TEGAL**

**UMI AZIZAH**